

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat										
Nama OPD	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat										
Tahun Penilaian	2025										
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2025-2029										
Tujuan Strategis	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien										
Sasaran Strategis OPD	Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah										
Urusan Pemerintahan	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan										
OPD yang Dinilai	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat										
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Pemanfaatan Sistem Pengadaan									
		Persentase penggunaan SPSE									
		Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ									
		Tingkat Kematangan UKPBJ									
1	Kegiatan: Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Secara Kompetitif	Perencanaan dan Pelaksanaan	Tidak tercapainya target pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu	RSO.26.99.02.01	Kabag/PPTK	Masih belum optimalnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengadaan oleh para pelaku pengadaan	Eksternal dan Internal	UC	Berpengaruh pada pencapaian target serapan anggaran Pemerintah Provinsi Kalbar.	Biro PBJ dan Perangkat Daerah terkait
	1	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Perencanaan	Informasi rencana jadwal yang tersaji dalam paket RUP yang diumumkan PA/KPA tidak tepat / tidak mencerminkan rencana pelaksanaan yang sebenarnya/	RSO.26.99.02.02	Kabag/PPTK	Kurangnya koordinasi terkait penentuan waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga admin RUP pada perangkat daerah kurang tepat dalam melakukan inputan RUP kedalam Aplikasi SIRUP.	Eksternal	C	Menumpuknya penyampaian paket tender/seleksi serta pelaksanaan metode lainnya pada pengadaan barang/jasa dalam periode waktu tertentu.	Perangkat Daerah
				Lambannya aktivitas pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan s/d serah terima pekerjaan	RSO.26.99.02.03	Kabag/PPTK	Lambannya penetapan pelaku pengadaan barang/jasa pada perangkat daerah.	Eksternal	C	Ketidaktertiban dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan inputan RUP kedalam Aplikasi SIRUP.	Perangkat Daerah
	2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	Pokja Pemilihan mengalami kelebihan beban paket pengadaan berjalan	RSO.26.99.02.04	Kabag/PPTK	Belum terpenuhinya ketersediaan SDM Pokja Pemilihan sesuai perhitungan beban kerja	Internal	C	Proses pelayanan pemilihan penyedia terlambat karena usulan PPK	Biro PBJ dan Perangkat Daerah terkait
				Pokja Pemilihan tidak leluasa dalam mereview, menetapkan durasi jadwal pemilihan, menyusun dokumen pemilihan, hingga mengevaluasi penawaran peserta	RSO.26.99.02.05	Kabag/PPTK	Keterlambatan PPK dalam menyampaikan dokumen persiapan pengadaan	Internal	C	Kegagalan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang menyebabkan bertambahnya waktu pemilihan penyedia	Biro PBJ dan Perangkat Daerah terkait
	3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	Penyajian data belum optimal	RSO.26.99.02.06	Kabag/PPTK	Format data/penyajian data terkait informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum mencerminkan keadaan yang semestinya.	Internal	C	Data hasil Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan kurang optimal dalam memberikan pertimbangan/saran yang tepat bagi perumusan strategi pengadaan ditahun berikutnya.	Biro PBJ

				Perencanaan pengadaan tidak akurat/tepat	RSO.26.99.02.07	Kabag/PPTK	Penginputan RUP pada Aplikasi SIRUP tidak akurat	Internal	C	2. Pelaksanaan PBJ tidak tepat waktu	Biro PBJ
2	Kegiatan: Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Menggunakan SPSE	Pelaksanaan	Rencana RUP dan Realisasi Pengadaan Barang/ Jasa Pada Aplikasi SPSE tidak diinput / tidak lengkap	RSO.26.99.02.02.08	Kabag/PPTK	Belanja Operasional dan Belanja Modal yang seluruhnya harus diinput pada Aplikasi SPSE	Eksternal	C	Rendahnya Nilai Rapor Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Kalbar secara Nasional	Pemerintah Daerah/ Biro PBJ
1	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Pelaksanaan	Rendahnya Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di SPSE	RSO.26.99.02.02.09	Kabag/PPTK	Jumlah Pengaduan (Tiket) yang di Eskalasi Ke Admin LKPP Tidak Ditindaklanjuti	Eksternal	UC	Beberapa Permasalahan Teknis yang menyangkut Aplikasi SPSE tidak dapat diselesaikan	Biro PBJ
2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	Aplikasi pendukung belum mampu memenuhi kebutuhan pengguna	RSO.26.99.02.02.10	Kabag/PPTK	Kebutuhan Fungsi Aplikasi Yang Dinamis	Internal	C	Pemanfaatan Aplikasi Pendukung tidak Optimal	Biro PBJ
3	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	Terbatasnya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa yang dipublikasi	RSO.26.99.02.11	Kabag/PPTK	Pemilik Informasi (OPD) Tidak Melaporkan Terkait Pelaksanaan PBJ	Eksternal	C	Tidak dapat mempublikasikan seluruh Pengadaan Barang dan Jasa	Biro PBJ
3	Kegiatan: Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pemenuhan variabel Level Kematangan UKPBJ di Kalbar	Pelaksanaan	Upaya Meningkatkan Tingkat Kematangan UKPBJ Kab/Kota Menjadi Level 3 (Pro Aktif) tidak tercapai	RSO.26.99.02.12	Kabag/PPTK	UKPBJ Kab/Kota belum dapat memenuhi 9 variabel tingkat kematangan	Eksternal	UC	masih membutuhkan waktu untuk meningkatkan tingkat kematangan UKPBJ menjadi level 3 (pro aktif)	Biro PBJ dan UKPBJKab/Kota
			Pelaksanaan	Partisipasi Pelaku Pengadaan Khususnya Penyedia Dalam Kegiatan Pembinaan PBJ Kurang Optimal	RSO.26.99.02.13	Kabag/PPTK	Kegiatan Pembinaan Yang Bersifat Tatap Muka Sangat Terbatas	Internal	C	pelaku usaha masih sering menemui kendala dalam proses pengadaan	Biro PBJ
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	Pengembangan Kompetensi Pengelola pengadaan barang dan jasa tidak maksimal	RSO.26.99.02.14	Kabag/PPTK	Terbatasnya Anggaran Untuk Pengembangan Kompetensi Dibandingkan Dengan Kebutuhan Kompetensi Yang Perlu Dikembangkan	Internal	C	Tidak optimalnya pengadaan barang dan jasa	Biro PBJ dan Perangkat Daerah Terkait
2	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	Level 3 Center Of Excellence Kab/Kota tidak tercapai	RSO.26.99.02.15	Kabag/PPTK	UKPBJ Kab/Kota belum dapat memenuhi 4 domain dan 9 variabel tingkat kematangan	Eksternal	UC	UKPBJ Kab/Kota tidak bisa menjadi Center Of Excellence level 3 dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang pro aktif	Biro PBJ dan UKPBJ Terkait
3	Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	Kompetensi pelaku pengadaan barang dan jasa OPD tidak optimal	RSO.26.99.02.16	Kabag/PPTK	Kegiatan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis PBJ Tidak Optimal	Internal	C	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak optimal	Biro PBJ dan OPD

Pontianak, 19 Januari 2026
 Pjt. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA,



HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda		Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat			
Tahun Penilaian		2025			
Tujuan Strategis		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien			
Urusan Pemerintah		Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan			
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Resiko	Analisis Risiko		Skala Risiko
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	
a	b	c	d	e	F=dxe
I	Risiko Strategis				
1					
2					
II	Risiko Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa				
	Menurunnya Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	RSP.26.99.02.01	4	3	12
III	Risiko Operasional Biro Pengadaan Barang dan Jasa				
1	Tidak tercapainya target pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu	RSO.26.99.02.01	3	2	6
2	Informasi rencana jadwal yang tersaji dalam paket RUP yang diumumkan PA/KPA tidak tepat (tidak mencerminkan rencana pelaksanaan yang sebenarnya)	RSO.26.99.02.02	3	3	9
3	Lambannya aktivitas pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan s/d serah terima pekerjaan	RSO.26.99.02.03	4	3	12
4	Pokja Pemilihan mengalami kelebihan beban paket pengadaan berjalan	RSO.26.99.02.04	3	3	9
5	Pokja Pemilihan tidak leluasa dalam mereview, menetapkan durasi jadwal pemilihan, menyusun dokumen pemilihan, hingga mengevaluasi penawaran peserta	RSO.26.99.02.05	3	3	9
6	Penyajian data belum optimal	RSO.26.99.02.06	3	3	9
7	Perencanaan pengadaan tidak akurat/tepat	RSO.26.99.02.07	4	3	12
8	Rencana RUP dan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Aplikasi SPSE tidak diinput / tidak lengkap	RSO.26.99.02.07	4	3	12
9	Rendahnya Persentase Tindak Lanjut Pengadaan di SPSE	RSO.26.99.02.02.08	3	2	6
10	Aplikasi pendukung belum mampu memenuhi kebutuhan pengguna	RSO.26.99.02.02.09	3	2	6
11	Terbatasnya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa yang dipublikasi	RSO.26.99.02.02.10	3	2	6
12	Upaya Meningkatkan Tingkat Kematangan UKPBJ Kab/Kota Menjadi Level 3 (Pro Aktif) tidak tercapai	RSO.26.99.02.11	2	2	4
13	Partisipasi Pelaku Pengadaan Khususnya Penyedia Dalam Kegiatan Pembinaan PBJ Kurang Optimal	RSO.26.99.02.12	3	3	9
14	Pengembangan Kompetensi Pengelola pengadaan barang dan jasa tidak maksimal	RSO.26.99.02.13	3	2	6
15	Level 3 Center Of Excellence Kab/Kota tidak tercapai	RSO.26.99.02.14	3	2	6
16	Kompetensi pelaku pengadaan barang dan jasa OPD tidak optimal	RSO.26.99.02.15	3	3	9

Pontianak, 15 Januari 2026

Plt. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



DAFTAR RESIKO PRIORITAS

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
 Tahun Penilaian : 2026
 Tujuan Strategis : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
1						
2						
II	Risiko Strategis					
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa					
	Menurunnya Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	RSO.26.99.02.04	12	Kepala Biro PBJ Setda Prov Kalbar	1. a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) : Tidak akuratnya data/informasi yang tersaji pada setiap paket RUP yang telah diumumkan pada Aplikasi SiRUP oleh PA/KPA, sehingga Data RUP Final Tahun Anggaran 2025 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat menggambarkan kondisi pengadaan barang dan jasa yang sesungguhnya. b. E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat): proses pengusulan paket pekerjaan dengan metode pengadaan secara tender/seleksi kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan berdampak terhadap penyerapan anggaran yang tidak maksimal, kualitas pekerjaan yang menurun dan terlambatnya pelayanan publik. c. E-Purchasing: kurangnya ketelitian memilih kategori dalam pemilihan penyedia oleh Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga terjadinya kesalahan terhadap pelaksanaan belanja pada metode e-purchasing yang berujung pada kesalahan administrasi. d. Non E-Tendering/Non E-Purchasing: Masih terdapat perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara manual (non-elektronik) sehingga hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak maksimal. Ketidakpatuhan tersebut tentunya dapat menghambat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). e. E-Kontrak: Kurangnya kesadaran PPK dalam melaksanakan penginputan Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menyebabkan progres pekerjaan tidak akan terbaca oleh sistem UKPBJ maupun LKPP sehingga salah satu objek kepatuhan pengadaan barang/jasa tidak tercapai. 2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ: Ketidakterpenuhinya standar kompetensi SDM PBJ menimbulkan risiko penurunan nilai ITKP, yang berimplikasi pada rendahnya kualitas tata kelola pengadaan. 3. Tingkat Kematangan UKPBJ: tingkat kematangan UKPBJ merupakan komponen penilaian ITKP dengan bobot 40 poin, sehingga ketidakefektifan pada aspek tersebut berisiko menurunkan capaian ITKP dan kinerja tata kelola pengadaan.	Berpengaruh pada pencapaian target serapan anggaran Pemerintah Provinsi Kalbar.
III	Risiko Operasional					
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa					
1	Informasi rencana jadwal yang tersaji dalam paket RUP yang diumumkan PA/KPA tidak tepat (tidak mencerminkan rencana pelaksanaan yang sebenarnya)	RSO.26.99.02.02	6	Perangkat Daerah	Kurangnya koordinasi terkait penentuan waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga admin RUP pada perangkat daerah kurang tepat dalam melakukan inputan RUP kedalam Aplikasi SiRUP.	Menumpuknya penyampaian paket tender/seleksi serta pelaksanaan metode lainnya pada pengadaan barang/jasa dalam periode waktu tertentu.
2	Lambannya aktivitas pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan s/d serah terima pekerjaan	RSO.26.99.02.03	9	Perangkat Daerah	Lambannya penetapan pelaku pengadaan barang/jasa pada perangkat daerah.	Ketidaktertiban dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan inputan RUP kedalam Aplikasi SiRUP.
3	Pokja Pemilihan mengalami kelebihan beban paket pengadaan berjalan	RSO.26.99.02.04	12	Biro PBJ dan Perangkat Daerah terkait	Belum terpenuhinya ketersediaan SDM Pokja Pemilihan sesuai perhitungan beban kerja	Proses pelayanan pemilihan penyedia terlambat karena usulan PPK

4	Pokja Pemilihan tidak leluasa dalam mereview, menetapkan durasi jadwal pemilihan, menyusun dokumen pemilihan, hingga mengevaluasi penawaran peserta	RSO.26.99.02.05	9	Biro PBJ dan Perangkat Daerah terkait	Keterlambatan PPK dalam menyampaikan dokumen persiapan pengadaan	Kegagalan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang menyebabkan bertambahnya waktu pemilihan penyedia
5	Penyajian data belum optimal	RSO.26.99.02.06	9	Biro PBJ	Format data/penyajian data terkait informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum mencerminkan keadaan yang semestinya.	Data hasil Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan kurang optimal dalam memberikan pertimbangan/saran yang tepat bagi perumusan strategi pengadaan ditahun berikutnya.
6	Perencanaan pengadaan tidak akurat/tepat	RSO.26.99.02.07	9	Biro PBJ	Penginputan RUP pada Aplikasi SIRUP tidak akurat	2. Pelaksanaan PBJ tidak tepat waktu
7	Rencana RUP dan Realisasi Pengadaan Barang/ Jasa Pada Aplikasi SPSE tidak diinput / tidak lengkap	RSO.26.99.02.02.08	12	Pemerintah Daerah/ Biro PBJ	Belanja Operasional dan Belanja Modal yang seluruhnya harus diinput pada Aplikasi SPSE	Rendahnya Nilai Rapor Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Kalbar secara Nasional
8	Rendahnya Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di SPSE	RSO.26.99.02.02.09	12	Biro PBJ	Jumlah Pengaduan (Tiket) yang di Eskalasi Ke Admin LKPP Tidak Ditindaklanjuti	Beberapa Permasalahan Teknis yang menyangkut Aplikasi SPSE tidak dapat diselesaikan
9	Aplikasi pendukung belum mampu memenuhi kebutuhan pengguna	RSO.26.99.02.02.10	6	Biro PBJ	Kebutuhan Fungsi Aplikasi Yang Dinamis	Pemanfaatan Aplikasi Pendukung tidak Optimal
10	Terbatasnya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa yang dipublikasi	RSO.26.99.02.11	6	Biro PBJ	Pemilik Informasi (OPD) Tidak Melaporkan Terkait Pelaksanaan PBJ	Tidak dapat mempublikasikan seluruh Pengadaan Barang dan Jasa
11	Upaya Meningkatkan Tingkat Kematangan UKPBJ Kab/Kota Menjadi Level 3 (Pro Aktif) tidak tercapai	RSO.26.99.02.12	6	Biro PBJ dan UKPBJKab/Kota	UKPBJ Kab/Kota belum dapat memenuhi 9 variabel tingkat kematangan	masih membutuhkan waktu untuk meningkatkan tingkat kematangan UKPBJ menjadi level 3 (pro aktif)
12	Partisipasi Pelaku Pengadaan Khususnya Penyedia Dalam Kegiatan Pembinaan PBJ Kurang Optimal	RSO.26.99.02.13	4	Biro PBJ	Kegiatan Pembinaan Yang Bersifat Tatap Muka Sangat Terbatas	pelaku usaha masih sering menemui kendala dalam proses pengadaan
13	Pengembangan Kompetensi Pengelola pengadaan barang dan jasa tidak maksimal	RSO.26.99.02.14	9	Biro PBJ dan Perangkat Daerah Terkait	Terbatasnya Anggaran Untuk Pengembangan Kompetensi Dibandingkan Dengan Kebutuhan Kompetensi Yang Perlu Dikembangkan	Tidak optimalnya pengadaan barang dan jasa
14	Level 3 Center Of Excellence Kab/Kota tidak tercapai	RSO.26.99.02.15	6	Biro PBJ dan UKPBJ Terkait	UKPBJ Kab/Kota belum dapat memenuhi 4 domain dan 9 variabel tingkat kematangan	UKPBJ Kab/Kota tidak bisa menjadi Center Of Excellence level 3 dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang pro aktif
15	Kompetensi pelaku pengadaan barang dan jasa OPD tidak optimal	RSO.26.99.02.16	6	Biro PBJ dan OPD	Kegiatan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis PBJ Tidak Optimal	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak optimal

Pontianak, 19 Januari 2026
 Ph. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Mengatasi Risiko Yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
 Tahun Penilaian : 2026
 Tujuan Strategis : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
III Resiko Operasional							
1	Informasi rencana jadwal yang tersaji dalam paket RUP yang diumumkan PA/KPA tidak tepat (tidak mencerminkan rencana pelaksanaan yang sebenarnya)	RSO.26.99.02.02	Menyusun Laporan Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa setiap bulan dan di laporkan kepada Kepala Daerah	Akses pada sistem monitoring di LKPP sering mengalami gangguan	Berkomunikasi dengan Admin LKPP RI	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 s/d 2 hari Kalender Kerja
2	Lambannya aktivitas pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan s/d serah terima pekerjaan	RSO.26.99.02.03	Melaksanakan kegiatan Reviu dan Pendampingan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah secara luring/daring	Tim sulit untuk melakukan reviu/pendampingan ketika masih banyak Perangkat Daerah belum menyiapkan dan/atau belum dapat menjelaskan dokumen perencanaan PBJ meliputi: KAK/Spesifikasi Teknis Barang/Jasa; RAB; Pemaketan; jadwal kegiatan. Begitu juga apabila RUP belum diinput pada SIRUP	kegiatan Reviu dan Pendampingan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah dilakukan secara berkala/bertahap dan setiap tahapan berikutnya sebagai evaluasi atas tahapan sebelumnya untuk melihat progres capaian dari Perangkat Daerah	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Oktober-Desember Tahun Anggaran sebelumnya dilanjutkan Januari-Maret Tahun Anggaran berjalan
3	Pokja Pemilihan mengalami kelebihan beban paket pengadaan berjalan	RSO.26.99.02.04	Meningkatkan Jumlah SDM pada Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa.	Perhitungan Terhadap Kebutuhan JFPBJ Ditetapkan Oleh LKPP	Berkomunikasi terus menerus dengan LKPP dan BKD Provinsi Kalbar	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Januari-Desember
4	Pokja Pemilihan tidak leluasa dalam mereview, menetapkan durasi jadwal pemilihan, menyusun dokumen pemilihan, hingga mengevaluasi penawaran peserta	RSO.26.99.02.05	Melaksanakan Percepatan Pengadaan Dengan Menyusun Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat	Kewenangan Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Seluruhnya Berada di PPK pada Perangkat Daerah masing-masing	Menyampaikan Permasalahan Kepada Pimpinan Melalui Nota Dinas	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Januari-Desember
5	Penyajian data belum optimal	RSO.26.99.02.06	Melakukan pengolahan data secara mandiri, baik data yang bersumber dari internal atau pun sumber data lainnya.	Data yang diterbitkan oleh LKPP sering tidak akurat sehingga perlu dilakukan pengolahan secara mandiri.	melakukan evaluasi secara berkala terhadap data-data yang diperoleh dan yang akan disajikan	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Januari-Desember
6	Perencanaan pengadaan tidak akurat/tepat	RSO.26.99.02.07	Untuk meningkatkan Kepatuhan Perencanaan telah dibuat Kebijakan yang disusun melalui Surat Edaran Gubernur tentang Kewajiban Pengumuman RUP Atas Beban APBD Prov. Kalbar T.A. 2025	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa mulai dari pengumuma RUP s/d BAST dilakukan oleh Perangkat Daerah masing-masing sehingga Biro PBJ Kesulitan dalam mengontrol keseluruhan pengadaan	Melakukan Evaluasi Terus Menerus Kepada Perangkat Daerah Melalui Surat Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan yang ditandatangani Gubernur/Sekda	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Januari-Desember
7	Rencana RUP dan Realisasi Pengadaan Barang/ Jasa Pada Aplikasi SPSE tidak diinput / tidak lengkap	RSO.26.99.02.02.08	Telah dilaksanakan Evaluasi Baik itu Penginputan RUP pada Aplikasi SIRUP dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa s/d Pemberian Penilaian Terhadap Penyedia Melalui Surat yang ditetapkan Gubernur/Sekda	Validasi Data yang tidak dilakukan secara berjenjang oleh perangkat daerah (antara perencanaan dan pelaku pengadaan)	Terus Menerus Mengingatkan Perangkat Daerah.	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Januari-Desember
8	Rendahnya Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di SPSE	RSO.26.99.02.02.09	dibentuk tim PIC LPSE dalam menangani pengaduan oleh user.	- Terdapat user baru yang ditugaskan sehingga user tidak menguasai teknis penggunaan aplikasi. - Permasalahan akses server yang susah sehingga user mendapatkan kendala dalam menggunakan aplikasi.	- Memberikan edukasi kepada user secara langsung sehingga kesalahan operasional dapat di minimisir. - melakukan koordinasi dengan pic LKPP dan Telkom dalam penanggulangan masalah.	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Januari-Desember

9	Aplikasi pendukung belum mampu memenuhi kebutuhan pengguna	RSO.26.99.02.02.10	Dilakukan Evaluasi secara berkala untuk aplikasi pendukung baik terhadap pengaduan user ataupun perubahan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	- Perubahan Peraturan Perundangan yang berlaku. Terbatasnya anggaran untuk melakukan perubahan atau perbaikan aplikasi yang digunakan	Melakukan prioritas kegiatan berdasarkan tingkat risiko dan urgensi, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia melalui efisiensi belanja, serta memanfaatkan sumber daya internal secara maksimal agar aplikasi tetap dapat memenuhi kebutuhan pengguna.	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jan-Desember
10	Terbatasnya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa yang dipublikasi	RSO.26.99.02.11	-Dilakukan share informasi melalui aplikasi resmi, sosial media. -melakukan pengolahan data secara periodik sebagai pembandingan data dari lkpp	Data yang diterbitkan oleh LKPP sering tidak akurat sehingga perlu dilakukan pengolahan secara mandiri.	Membuat dan mengembangkan Sistem Informasi yang bisa diakses secara publik sebagai alternatif sumber informasi selain dari LKPP.	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Januari-Desember
11	Upaya Meningkatkan Tingkat Kematangan UKPBJ Kab/Kota Menjadi Level 3 (Pro Aktif) tidak tercapai	RSO.26.99.02.12	Melakukan Pendampingan dan Kolaborasi Bersama Perangkat Daerah Dalam Pembinaan PBJ Bagi UKPBJ Kab/Kota	Pendampingan PBJ dilakukan secara terencana melalui koordinasi, pemanfaatan pendampingan daring, serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut oleh UKPBJ	Melaksanakan pendampingan dan kolaborasi pembinaan PBJ secara bertahap kepada UKPBJ Kab/Kota melalui penyusunan rencana pendampingan, pelaksanaan pendampingan daring/luring, serta monitoring dan evaluasi untuk mendukung peningkatan tingkat kematangan UKPBJ dan nilai ITKP.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Januari-Desember
12	Partisipasi Pelaku Pengadaan Khususnya Penyedia Dalam Kegiatan Pembinaan PBJ Kurang Optimal	RSO.26.99.02.13	Laporan Monitoring Terhadap Rekapitulasi Persentase RUP Yang Diumumkan Setiap Bulannya	Sinkronisasi Data RUP Yang Didapat Dari Sistem LKPP Terkadang Gagal.	Melakukan Penarikan Data Dihari Berikutnya	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Hari
13	Pengembangan Kompetensi Pengelola pengadaan barang dan jasa tidak maksimal	RSO.26.99.02.14	Pembinaan Terhadap UKPBJ Kab/Kota	Kesiapan Dokumen Pendukung Dari UKPBJ Kab/Kota	Tetap Melakukan Pembinaan	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Hari
14	Level 3 Center Of Excellence Kab/Kota tidak tercapai	RSO.26.99.02.15	Melakukan Pendampingan dan Kolaborasi Bersama Perangkat Daerah Dalam Pembinaan PBJ Bagi Pelaku UMKM	Kegiatan Pembinaan Kepada Penyedia Tetap Bergantung Pada Program Kerja OPD Pengampu	Tetap Melakukan Pembinaan	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jan-Desember
15	Kompetensi pelaku pengadaan barang dan jasa OPD tidak optimal	RSO.26.99.02.16	Memberikan informasi terkait peningkatan kompetensi bagi pelaku pengadaan barang/jasa	Pengendalian masih bersifat informatif dan belum memastikan peningkatan kompetensi SDM PBJ secara terukur.	Tetap Melakukan Pembinaan	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jan-Desember

Pontianak, 15 Januari 2026
Plt. KEPALA BIRU PENGADAAN BARANG DAN JASA



PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda		Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat					
Tahun Penilaian		2026					
Tujuan Strategis		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien					
Urusan Pemerintahan		Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan					
No	Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Berkomunikasi dengan Admin LKPP RI	Via email/ WA/ Surat Sekda/Kunjungan Langsung	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Perangkat Daerah	Jan-Des	Jan-Des	
2	kegiatan Reviu dan Pendampingan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah dilakukan secara berkala/bertahap dan setiap tahapan berikutnya sebagai evaluasi atas tahapan sebelumnya untuk melihat progres capaian dari Perangkat Daerah	Menyurati Perangkat Daerah melalui Surat Gubernur	Bagian Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	Perangkat Daerah/UPT	Jan-Des Setelah Terbit DPA dan DPPA	Jan-Des Setelah Terbit DPA dan DPPA	
3	Melakukan Penarikan Data Dihari Berikutnya	Dibuat grup WA untuk menyampaikan/memberikan Laporan Hasil Inputan setiap minggu di level admin dan pimpinan	PBJ Prov. Kalbar	UKPBJ Kab/Kota	Jan-Des Setelah Terbit DPA dan DPPA	Jan-Des Setelah Terbit DPA dan DPPA	
4	Tetap Melakukan Pembinaan	Melakukan pembinaan secara langsung ke UKPBJ Kab/Kota dan melalui Surat ke Bupati/Walikota	PBJ Prov. Kalbar	SDM Pengadaan Barang dan Jasa Serta Pelaku Usaha	Jan-Des	Jan-Des	
5	Koordinasi Dengan LKPP Sebagai Pelaksanaan Pembinaan	Via email/ WA/ Surat Sekda/Zoom Meeting	PBJ Prov. Kalbar	SDM Pengadaan Barang dan Jasa Serta Pelaku Usaha	Jan-Des	Jan-Des	

Pontianak, 15 Januari 2025
 Plt. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2025 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Berkomunikasi dengan Admin LKPP RI	Via email/ WA/ Surat Sekda/Kunjungan Langsung	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Jan-Des	Jan-Des	
2	kegiatan Reviu dan Pendampingan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah dilakukan secara berkala/bertahap dan setiap tahapan berikutnya sebagai evaluasi atas tahapan sebelumnya untuk melihat progres capaian dari Perangkat Daerah	Menyurati Perangkat Daerah melalui Surat Gubernur	Bagian Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	Jan-Des Setelah Terbit DPA dan DPPA	Jan-Des Setelah Terbit DPA dan DPPA	
3	Melakukan Penarikan Data Dihari Berikutnya	Dibuat grup WA untuk menyampaikan/memberikan Laporan Hasil Inputan setiap minggu di level admin dan pimpinan	PBJ Prov. Kalbar	Jan-Des Setelah Terbit DPA dan DPPA	Jan-Des Setelah Terbit DPA dan DPPA	
4	Tetap Melakukan Pembinaan	Melakukan pembinaan secara langsung ke UKPBJ Kab/Kota dan melalui Surat ke Bupati/Walikota	PBJ Prov. Kalbar	Jan-Des	Jan-Des	
5	Koordinasi Dengan LKPP Sebagai Pelaksanaan Pembinaan	Via email/ WA/ Surat Sekda/Kunjungan Langsung	PBJ Prov. Kalbar	Jan-Des	Jan-Des	

Pontianak, 15 Januari 2025

Plt. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

